

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atsar, A., & Apriani, R. (2019). Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. (Jakarta: Budi Utama).
- Barkatullah, A. H. (2017). Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia. (Bsndung: CV. Nusa Media).
- Dewi, E. W. (2015). “Hukum Perlindungan Konsumen”, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Hadjon, P. M. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Irwansyah, (2023). Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, (Yogyakarta, Mega Cakrawala).
- Sidabalok, J. (2006). “Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djojodirjo, M. M. A. (1979). “Perbuatan Melawan Hukum”, Cetakan Pertama, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Martien D. (2023). Perlindungan Hukum Data Pribadi. (Makasar: Mitra Ilmu).
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2020). Teori hukum. (Jakarta: Prenada Media).
- Miru A. (2007). Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Muhaimin, (2020). Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, (Mataram (NTB).
- Fuady, M. (2014). “Konsep Hukum Perdata”, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Qustulani M. (2018). Perlindungan Hukum Konsumen. (Tangerang: PSP Nusantara Press).
- Rahardjo S. (2000). Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Rosmawati. (2018). “Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen”, Depok: Kencana.
- Soesilo, Pramudji R. (2008). “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Cetakan Pertama, Surabaya: Rhedbook Publisher.
- Sutedi, A. (2008). “Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, Bogor: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*)
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1039)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1320)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 702).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penarikan Pangan Dari Peredaran.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

Salsabila, S. (2023). Pengaruh Gaya Hidup Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk *Skincare* Avoskin di Kota Banda Aceh

(Skripsi, Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri AR-RANTRY Banda Aceh).

Htp, Sari, E. M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan) (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Kota Medan).

Khoerunnisa, R. Perlindungan hukum terhadap konsumen produk *skincare* tanpa sertifikasi halal studi putusan nomor. 171/Pid. Sus/2020/PN.Ptk (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta).

Kumalasari, I. S. (2022). Implementasi UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Relasi Produk Perawatan Kecantikan di Kota Parepare (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, Kota Parepare).

Pratama, O. R. F. (2024). Pengaruh Atribut Produk dan Brand Trust terhadap Keputusan Pembelian Produk Sunscreen Glad2Glow di Kota Surabaya (Skripsi, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Kota Surabaya).

Riqoyani, K. A. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Skincare Palsu Melalui Marketplace Shopee (Skripsi, Program Studi Ilmu

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Semarang, Kota Semarang).

Jurnal atau Artikel:

Akbar, Saraswati Sahda, dkk. (2025). “*Pertanggungjawaban Hukum Owner Skincare terkait Overclaim pada Produk Kecantikan*”, *Forschungsforum Law Jurnal Forum Riset dan Debat Mahasiswa Hukum UPN Veteran Jakarta*, Vol.2, No.1, hlm. 81-83. DOI: <https://doi.org/10.35586/flj.v2i1.9889>

Ameliani, P., dkk. (2022) “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar BPOM*”. *Jurnal Hukum dan Pranata Social Islam*. Vol. 4, No.2, hlm. 653-660. DOI: <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2062>

Anugrah, R., dkk. (2025) “*Analisis Tanggungjawab Pelaku Usaha Bisnis Kosmetik Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengedaran Produk Skincare yang Terbukti Overclaim dengan Entitas Tanpa Izin Edar yang Jelas*”, *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Volume. 3, Nomor. 1, 120-133*. DOI: <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i1.4755>

Arumbi, N. D., dkk. (2024). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Overclaim Sun Protection Factor (SPF) Pada Produk Tabir Surya X. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 2. Hlm. 25-34. DOI: <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.127>

Astuti, W., dkk. (2023) “*Kajian Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terkait Penjaminan Mutu Produk Kosmetika Dan Tugas Pokok*

- Fungsi Apoteker”. *Malahayati Health Student Journal*, Vol. 3, No. 3, 2023, hlm 743-751. DOI: <https://doi.org/10.33024/mahesa.v3i3>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik penduduk perempuan Indonesia 2023. <https://www.bps.go.id/en/statistics>, diakses pada 18.30, tanggal 3 Januari 2025.
- Haryati, T. (2020). Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Illegal Di Kota Bima. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9, No.1, 2020, hlm. 17-30. DOI: <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.17>
- Hasudungan, G. G., & Bambang Eko Turisno, A. (2016). Perlindungan Konsumen terhadap Iklan yang Menggunakan Kata Superlatif. *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No.2. hlm. 1-15. Doi: <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11115>
- Humaira, A., Yulia, Y. & Fatahillah F., (2021) “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM (Studi Penelitian di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur)*.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)* Vol. 4, No. 2, 2021, hlm.75-85. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4109>
- Ilhami, M. W., dkk. (2024). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 9, hlm. 462-469. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>.
- Kuntag, R. F., dkk. (2021). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-

- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, Vol. 9. No. 4. hlm. 151-157.
- Lutfiah, A. Husni, P. (2023) “Tata Cara Pengajuan Notifikasi Produk Kosmetika Dalam Rangka Peningkatan Produk Kosmetik Yang Aman Dan Bermutu di Bandung Jawa Barat”. *Farmaka* Vol. 22, No.1, hlm. 103-108. DOI: <https://doi.org/10.24198/farmaka.v22i1.51263>
- Marlina, H., Raspita, D., & Bidari, C. D. (2025). Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas *Overclaim* Produk Skincare di Platform E-Commerce. *Marwah Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm.10-23. DOI: <https://doi.org/10.32502/mh.v3i1.9415>.
- Mugiono, M., dkk. “Efektivitas Penanganan Produk Yang Beredar Oleh BPOM Surabaya: Dampak Bagi Konsumen dan Kesehatan Masyarakat”, *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No.4, 2024, hlm. 11662-11669. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2187>
- Nasution, A. (2002). Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No. 8/1999-LN 1999 No. 42. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, hlm. 111-131.
- Nugroho, A. (2014). Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam membantu masyarakat yang dirugikan akibat iklan yang menyesatkan. *Lex Jurnalica*, Vol. 11, No. 2. hlm. 143-154. DOI: <https://doi.org/10.47007/lj.v11i2.982>
- Nuraeni, R., & Santoso, A. P. A. (2025). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk *Overclaim* Skincare di Indonesia. *Jurnal Inovasi Hukum*, Vol. 6, No. 1, hlm. 584-613, DOI: <https://ejournals.com/ojs/index.php/jih>.

- Rachmawati, P. (2023). Edukasi Terkait Keamanan Kosmetik Kepada Masyarakat. *Mitramas: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, No.2, hlm. 101-113. DOI: <https://doi.org/10.25170/mitramas.v1i2.4308>
- Santika, D. dkk (2024). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap *Overclaim* Pada Produk Skincare dalam Transaksi Online. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(2); 1039-1040. DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>.
- Sari, B. P., dkk. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait *Overclaim* Pelaku Usaha dalam Label Obat Ditinjau dari Pasal 8 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 4, No. 1, 2022, hlm. 83-100. DOI: <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v4i1.71>
- Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. *Journal de Facto*, 8(2): 108-121. DOI: <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v8i2>.
- Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 3, hlm. 46-64. DOI: <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ>.
- Subiyakto, A., Markoni, M., Widarto, J., & Nardiman, N. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kandungan Bahan Makanan Dan Minuman Berbahaya Ditinjau Dari Peraturan Bpom Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan*

Sejarah, Vol. 8, No. 4, hlm. 5408-5428, DOI:
<https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.27368>.

Suseno, H. A., Handayani, B. (2023) “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya”. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 10, hlm. 319-324. Doi:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10119465>

Tahaanii, A. N., & Waluyo, W. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Disebabkan *Overclaim* Pada Deskripsi Produk Kosmetik X (Perawatan Wajah). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 22, hlm. 1-12. DOI:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10077406>.

Trisandri, M. I. R., Alkautsar, S. A., & Saleh, M. Z. (2024). Pemasaran *Skincare* di Indonesia: Sebuah Fenomena Budaya Populer Korea Selatan. Jurnal Manajemen Riset Inovasi, Vol. 2, No. 1, hlm. 221-228. DOI:
<https://doi.org/10.55606/mri.v2i1.2215>.

Wardhani, M. E. K., & Sulistyowati, E. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kosmetik Terkait Produk Skincare Kemasan Share In Jar. *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 4, hlm 144-166. DOI:
<https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.58381>

Website:

Admin SIG, (2024). Tahapan Proses Lab Uji Skincare agar produk Anda Aman dan Legal <https://siglaboratory.com/id/tahapan-proses-lab-uji-skincare/> diakses pada 9 September 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik penduduk perempuan Indonesia 2023. <https://www.bps.go.id/en/statistics>, diakses pada 18.30, tanggal 3 Januari 2025.

BPOM, (2025). Waspada Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya “Teliti Sebelum Memilih kosmetika”, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/waspada-kosmetika-mengandung-bahan-berbahaya-oe-teliti-sebelum-memilih-kosmetika>, diakses pada tanggal 17 Mei 2025.

BPSK, (2025). Direktorat Jendral Perlindungan konsumen dan Tertib Niaga, <https://ditjenpktn.kemendag.go.id/direktorat-pemberdayaan-konsumen/bpsk> diakses pada tanggal 27 Mei 2025.

Dokter Detektif, (2024). Produk Daviena Skincare dicap overclaim https://www.tiktok.com/@dokterdetektif?_t=ZS-8waeDDozvx1&_r=1 diakses pada tanggal 9 September 2025.

DRW Skincare. (2021). Pengertian Skincare Lengkap dengan Jenis dan Kegunaannya <https://drwskincare.com/pengertian-skincare/> diakses pada 18.30, tanggal 13 Januari 2025.

Jumaiyah Hops, (2024). Dokter Detektif review produk retinol Daviena Skincare, sebut overclaim hingga tunjukkan hasil uji lab:ini terbukti. <https://www.hops.id/trending/29413534776/dokter-detektif-review-produk-retinol-daviena-skincare-sebut-overclaim-hingga-tunjukkan-hasil-uji-lab-ini-terbukti>, diakses pada 9 September 2025.

Parameter Uji Kosmetik yang harus dipahami Brand Owner

<https://ptcosmar.com/parameter-uji-kosmetik/>. diakses pada 19.30, tanggal 17 Mei 2025.

Tanskin. (2021) Mengenal Macam-macam Skincare yang wajib kamu miliki!

<https://tanskin.id/macam-macam-skincare/> diakses pada 19.00, tanggal 13 Januari 2025.

Vicarious Liability Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

<https://lbhpayoman.unpar.ac.id/vicarious-liability-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>. diakses pada 20.00 pada tanggal 20 Mei 2025.

Lain-lain:

KBBI, “Hukum”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, diakses pada 13.10, tanggal 13 Januari 2025.

KBBI, “Perlindungan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada 12.55, tanggal 13 Januari 2025.